

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan mengenai perubahan iklim ini mulai dikenal dan berkembang sejak dimulainya revolusi industri.¹ Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca global sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi.² Perubahan iklim menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan seluruh umat manusia dan membutuhkan peran penting dari sebuah kesepakatan global untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Pada tahun 1992 *Intergovernmental Negotiating Committee (INC)*, menyepakati secara konsensus sebuah Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang memiliki nama resmi *United Nations Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro, Brazil.³ Konferensi ini membahas permasalahan di sektor lingkungan yang dampaknya yang semakin terasa di seluruh negara. Dari konferensi tersebut hadirilah *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*.

¹ Hananto. 2018. Melihat Pertumbuhan Emisi Global Sejak 1850 dan Perkembangan Usaha Penurunannya. Mongabay (Situs Berita Lingkungan), diakses pada 6 November 2023. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/10/melihat-pertumbuhan-emisi-global-sejak-1850-dan-perkembangan-usaha-penurunannya/>

² NASA. 2020. What is climate change? Diakses pada 6 November 2023. <https://science.nasa.gov/climate-change/what-is-climate-change/>

³ Rhodes, C.J. 2016. The 2015 Paris Climate Change Conference : COP21. In *Science Progress* (Vol. 99, Issue 1, pp. 97-104). Science Reviews 2000 Ltd, diakses pada 6 November 2023. <https://doi.org/10.3184/003685016X14528569315192>

UNFCCC merupakan salah satu bentuk kerjasama multilateral dalam menanggulangi isu lingkungan.⁴ UNFCCC ini kemudian mengadakan pertemuan rutin tahunan yang dikenal dengan *Conference of Parties* (COP) guna membahas mengenai isu lingkungan serta tindakan penanggulangannya.⁵ Pada COP-21 yang diselenggarakan di Paris tahun 2015, dihasilkan sebuah kesepakatan yang bernama *Paris Agreement* atau Perjanjian Paris. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah agar setiap negara berkomitmen untuk mengurangi produksi emisi gas rumah kaca demi menjaga peningkatan suhu bumi stabil kurang dari 2°C pada abad ini hingga mencapai *net zero emission* (nol emisi karbon) pada tahun 2035.⁶

Amerika Serikat merupakan negara penyumbang emisi gas karbon terbesar kedua setelah Tiongkok (20.09%), yakni mencapai (17.89%) dari rata-rata emisi karbon global yang meliputi 197 pihak UNFCCC.⁷ Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), pada 2022, sekitar 60% produksi listrik Amerika Serikat berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar gas atau batu bara yang menjadi penghasil emisi tertinggi. Sisanya berasal dari energi terbarukan (21,5%) dan tenaga nuklir (18%).⁸

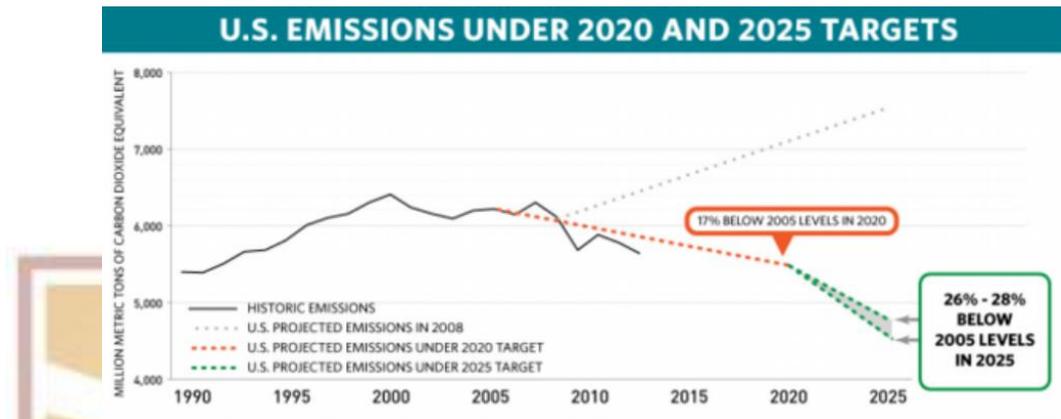
⁴ Alfian, F. et al. 2023. Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris pada Masa Pemerintahan Joe Biden. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9, No. 1.

⁵ International Institute for Sustainable Development (IISD). 2017. *UN Framework Convention on Climate Change – UNFCCC*.

⁶ International Institute for Sustainable Development (IISD). 2017.

⁷ Climate Analytics, “Paris Agreement Ratification Tracker”, diakses pada 11 Januari 2024. <https://climateanalytics.org/briefings/ratification-tracker/>

⁸ U.S - Energy Information Administration. <https://www.eia.gov/>



Gambar 1.1 Grafik Target Emisi AS untuk tahun 2020 dan 2025

Sumber : CBS News, NDC Reports, 2021

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Amerika Serikat memiliki ambisi yang tinggi dalam mencapai target emisinya pada tahun 2020 dan 2025. Berdasarkan laporan dari *Environmental Protection Agency* (EPA), Amerika Serikat bertanggung jawab atas 15 persen dari seluruh Emisi Gas Rumah Kaca diseluruh dunia.⁹ IPCC menjelaskan bahwa emisi tinggi yang terus berlanjut akan menyebabkan sebagian besar dampak negatif bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, dan pembangunan ekonomi serta memperbesar risiko bagi mata pencaharian dan bagi ketahanan pangan dan manusia.¹⁰

Perjanjian Paris diratifikasi oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama tepatnya pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017, setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presdient Amerika Serikat, Trump resmi mengumumkan untuk keluar dari kesepakatan Perjanjian Paris termasuk

⁹ Klivert, N. "The US has returned to the Perjanjian paris. What does this mean for climate change?", diakses pada 6 November 2023, <https://www.abc.net.au/news/science/2021-01-24/biden-usa-paris-climate-agreement-climate-change/13081766>

¹⁰ IPCC. 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report.

menghentikan pendanaan yang dialirkan untuk agenda iklim UNFCCC.¹¹ Trump dikenal luas sebagai tokoh yang tidak percaya dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Ia berpendapat bahwa perjanjian tersebut hanya memberatkan sektor industri dan ekonomi di Amerika Serikat.¹²

Pada awal pemerintahan Presiden Joe Biden, tepatnya pada 20 Januari 2021, Amerika Serikat memutuskan untuk kembali bergabung ke Perjanjian Paris.¹³ Biden berpendapat bahwa setiap rakyat Amerika Serikat berhak untuk menghirup udara segar, mengkonsumsi air bersih, dan makanan sehat. Biden mengeluarkan serangkaian tindakan eksekutif untuk mengatasi perubahan iklim pada awal masa pemerintahannya. Dalam menjalankan Perjanjian Paris, Amerika Serikat mencoba menerapkan kebijakannya dengan berbagai hal seperti melalui investasi, perjanjian ramah lingkungan, bantuan dana untuk energi ramah lingkungan, membangun infrastruktur bersih hingga mencapai 1.7 triliun dollar.¹⁴

Komitmen ini juga ditunjukkan Biden dengan memblokir pipa *Keystone XL*, proyek yang menjadi rebutan karena dapat membawa minyak dalam jumlah besar untuk disuling dari Kanada menuju Amerika Serikat.¹⁵ Sementara untuk

¹¹ Immelman, A. et al. 2020. "The Personality profile and leadership style of US president Donald Trump in office". Paper presented at the 43rd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Berlin, Germany, diakses pada 6 November 2023 http://digitalcommons.csbsju.edu/psychology_pubs/129/

¹² Azhiimi, N. 2023. Analisis Keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian paris di Era Donald Trump. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial, Vol. 5, No. 1. Medan.

¹³ United Nations Treaty Collection. C.N.10.2021.TREATIES-XXVII.7.d (Depositary Notification). PARIS AGREEMENT. United States of America: Acceptance.

¹⁴ McBride, J. 2020. Council on Foreign Relations. Presiden-Elect Biden on Foreign Policy. Diakses pada 26 April 2024 melalui <https://www.cfr.org/election2020/candidate-tracker#climate-and-energy>

¹⁵ Cattleya. 2021. "Kembalinya Amerika Serikat pada Perjanjian Paris (Perjanjian paris)", diakses pada 6 November 2023, <https://www.pcdstudiescenter.com/2021/02/10/kembalinya-amerika-serikat-pada-perjanjian-paris-paris-agreement/>

proses pengeboran minyak dan gas yang dilakukan di *Bears Ears* dan *Grand Staircase-Escalante*, harus dihentikan karena butuh tinjauan ulang. Langkah lainnya dalam tatanan eksekutif adalah Biden mengarahkan lembaga federal untuk meninjau seluruh regulasi dari era Trump yang dapat mempengaruhi kebijakan terkait krisis iklim dan membentuk kabinet atau badan khusus krisis iklim.¹⁶

Mengikuti uraian diatas, dapat terproyeksikan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Amerika Serikat yang kembali bergabung ke dalam Perjanjian Paris setelah sebelumnya memutuskan untuk menarik diri. Kebijakan ramah lingkungan yang diusung Biden demi mewujudkan Amerika Serikat bebas emisi karbon pada tahun 2035. Hal ini menjadi landasan bagi penulis untuk melihat apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat kembali bergabung ke dalam perjanjian iklim Paris tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap beberapa kebijakan luar negeri sebelumnya, salah satunya yaitu kebijakan iklim. Dimulai dengan menandatangani kembali Perjanjian Paris pada tahun 2021. Amerika Serikat merupakan salah satu negara penghasil gas karbon terbesar di dunia. Dampak yang dihasilkan dapat mengancam keberlangsungan hidup rakyat Amerika Serikat. Dengan kembalinya Amerika Serikat ke dalam Perjanjian Paris pada masa pemerintahan Joe Biden serta

¹⁶ Milman, O. The Guardian. Diakses pada 6 November 2023, <https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/environment/2021/jan/20/paris-climate-agreement-joe-biden-returns-us>

mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan, mengisyaratkan adanya kepentingan Amerika Serikat dalam menghadapi permasalahan isu global khususnya krisis iklim. Oleh sebab itu, penulisan ini memiliki urgensi yang signifikan guna melihat apa kepentingan Amerika Serikat bergabung kembali ke Perjanjian Paris, sehingga persoalan ini sangat menarik untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi pada rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penulisan yang dapat diteliti adalah “apa kepentingan nasional Amerika Serikat bergabung kembali ke Perjanjian Paris pada tahun 2021?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kepentingan nasional Amerika Serikat melalui kebijakan iklim Joe Biden yaitu, bergabung kembali ke Perjanjian Paris pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini menawarkan pengetahuan terkait kepentingan nasional Amerika Serikat melalui implementasi kebijakan Joe Biden setelah bergabung kembali ke Perjanjian Paris tahun 2021.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulisan selanjutnya dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan khususnya terkait iklim.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan riset untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya. Data ini tentu berguna sebagai pijakan bagi penulis untuk melancarkan penelitian ini. Penulis telah menghimpun serangkaian karya tulis ilmiah yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang penulis jadikan acuan utama adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis merujuk pada artikel jurnal yang berjudul “*President Biden Climate Change, Policy and Issues*” ditulis oleh Choi Hyeonjung. Artikel ini membahas terkait pemerintahan Biden yang mengusung beberapa agenda penting dalam pemerintahannya yang mana diantaranya, yaitu Covid 19, pemulihan ekonomi, kesetaraan gender, dan lingkungan. Kebijakan lingkungan menjadi prioritas utama Amerika Serikat dibawah pemerintahan Joe Biden, dimana rezim ini memiliki tujuan jangka pendek menghilangkan emisi Amerika Serikat sebanyak 50% pada tahun 2035, dan tujuan jangka panjang mencapai net zero emission pada tahun 2050.

Pada artikel ini dijelaskan meskipun pemerintah Biden memiliki ambisi besar dalam aksi iklim, pemerintahan Biden masih memperhatikan aspek ekonomi negara, Biden berencana melakukan investasi infrastruktur secara masif, menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan daya saing Amerika Serikat dalam proses mitigasi gas rumah kaca, sehingga arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden adalah kebijakan ekonomi hijau yang sebelumnya telah dibawa oleh mantan Presiden Barack Obama.¹⁷

¹⁷ Choi. 2021. “President Biden and Climate Change: Policy and Issues.” The Asan Institute for Policy Studies Yonsei University.

Hyeonjong dalam artikelnya juga mengemukakan pendapat bahwa rencana Presiden Biden ini mengkhawatirkan, mengingat pelaksanaan dari agenda ini hanya mengandalkan Badan Eksekutif tidak menjamin kekekalan dan dapat diubah dengan mudah oleh penerusnya. Lebih lanjut, Hyeonjong juga mengungkapkan keraguannya akan upaya kerjasama Amerika Serikat dalam menangani isu perubahan iklim dengan Tiongkok mengingat strategi ekonomi Tiongkok, *Belt Road Initiative* atau BRI yang dianggap sangat anti lingkungan. Penelitian Hyeonjong ini memberikan kontribusi dalam penelitian penulis untuk membantu dalam melihat bagaimana kebijakan Amerika Serikat khususnya di bidang perubahan iklim saat rezim Joe Biden, selain itu penelitian Hyeonjong ini tentu saja memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena dalam artikelnya Hyeonjong membahas mengenai kebijakan perubahan iklim Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden, sedangkan penelitian penulis akan berfokus kepada kepentingan nasional yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam keputusannya di Perjanjian Paris pada tahun 2021.

Literatur kedua adalah artikel yang ditulis oleh James D. Boy yang berjudul "*In Charge, But Not in Control: Biden's Foreign Policy*". Artikel yang ditulis pada tahun 2022 ini membahas terkait analisis kebijakan luar negeri Joe Biden selama tahun pertamanya menjabat. Tantangan yang dihadapi pemerintahan Biden berasal dari tiga isu utama yaitu, masyarakat, kebijakan dan presentasinya. Menurut artikel ini kebijakan Amerika Serikat selama ini dinilai cenderung bersifat partisan. Hal ini sangat relevan dengan kepemimpinan internasional Amerika Serikat yang telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir karena kebijakan yang tidak menentu. Hal ini dapat dilihat dari Perjanjian Paris, proyek

pipa Keystone XL, dan negosiasi dengan Iran mengenai pengendalian senjata. Kebijakan luar negeri Biden pada akhir tahun pertama tampaknya sangat reaktif, reaktif terhadap warisan Trump dan reaktif terhadap peristiwa di luar kendalinya. Di era ini, sangat wajar jika rezim otoriter tampak mendominasi, dengan mengandalkan media yang dikontrol negara untuk meredam perbedaan pendapat di dalam negeri dan menampilkan citra kohesi yang tidak bisa ditiru oleh negara-negara Barat pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya.¹⁸

Literatur ketiga adalah artikel yang ditulis oleh Rizky Ihsan yang berjudul “*Joe Biden’s Foreign Policy: What to Expect from the United States in the Indo Pacific*”. Artikel yang ditulis pada tahun 2022 ini membahas terkait Joe Biden yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat dengan memiliki banyak pengalaman di urusan pemerintahan, termasuk sebagai Ketua Komite Senat Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat. Mengacu pada janji kampanyenya, kebijakan luar negeri pemerintahan Biden akan bertujuan untuk memulihkan kredibilitas Amerika Serikat internasional berdasarkan nilai-nilai liberalisme. Artikel ini membahas aspirasi politik Biden melalui pidato, janji politik selama kampanye, serta pernyataan-pernyataan resminya. Artikel ini berpendapat bahwa meskipun Amerika Serikat cenderung mendorong nilai-nilai liberalisme dalam kebijakan luar negerinya, hambatan yang berdimensi internasional dapat mengurangi kemampuan ia dalam menentukan agenda kebijakan luar negerinya.

¹⁸ Boy, J. D. 2022. In Charge, But Not in Control: Biden’s Foreign Policy. Political Insight.

Kebijakannya tampaknya tidak berbeda secara signifikan dengan Presiden Donald Trump yang berkuasa sebelumnya.¹⁹

Gagasan Biden mengenai pandangan kebijakan luar negeri sejalan dengan prinsip-prinsip inti Partai Demokrat, yang menekankan perlunya “memperbarui dan menemukan kembali” kemitraan dan aliansi untuk menghadapi tantangan global. Menurut platform kebijakan luar negeri Partai Demokrat, aliansi Amerika Serikat ada untuk “melipatgandakan pengaruh kita, memperluas jangkauan kita, meringankan beban kita, dan memajukan kepentingan dan prioritas kita bersama”. Selain itu Joe Biden menekankan kepemimpinan Amerika, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan lingkungan. Ia menyebutkan beberapa prioritas kebijakan luar negeri, meningkatkan diplomasi, memulihkan kemitraan internasional, memperbarui komitmen terhadap pengendalian senjata, dan memimpin dunia dalam mengatasi krisis iklim.

Berbeda dengan Donald Trump, Joe Biden menempatkan perjuangan melawan perubahan iklim sebagai salah satu prioritas utamanya ketika ia menjabat. Meskipun Trump berulang kali mengatakan bahwa Perjanjian Paris merugikan Amerika, Biden bersikap sebaliknya, memutuskan Amerika Serikat untuk kembali ke perjanjian tersebut. Ia percaya bahwa perjanjian internasional dirancang untuk mencegah dampak lebih lanjut dari pemanasan global. Selain itu, Biden juga telah menjelaskan rencana ambisiusnya untuk

¹⁹ Ihsan, R. 2022. Joe Biden’s Foreign Policy: What to Expect from the United States in the Indo Pacific. Parahyangan Centre for International Studies (PACIS). Bandung.

menjadikan produksi listrik bebas karbon pada tahun 2035 dan emisi nol bersih pada tahun 2050.²⁰

Artikel ini juga menyatakan Biden yakin bahwa Amerika Serikat akan mampu membujuk para pemimpin dunia untuk bergabung dalam upaya Amerika untuk mewujudkan ekonomi energi bersih. Namun, tantangan utama Biden mungkin adalah memulihkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan Amerika Serikat. Penarikan diri Presiden Trump dari banyak perjanjian internasional telah berdampak buruk pada kredibilitas Amerika Serikat di mata teman dan sekutunya. Seperti penarikan diri Amerika Serikat dari Perjanjian Paris dipandang sebagai pengabaian kepemimpinan global, seperti yang dilakukan oleh banyak pemimpin Eropa dan Asia dicatat. Secara politis, situasi ini juga memungkinkan Tiongkok dan Uni Eropa untuk mengambil alih rezim iklim global dan meningkatkan reputasi mereka. Dalam hal ini, Presiden Biden harus mampu memulihkan kepemimpinan Amerika Serikat melalui berbagai keterlibatan di tingkat global.

Literatur keempat adalah artikel yang ditulis oleh Sabine Murphy yang berjudul *“What’s next for the United States? Part 2 : Climate Change and Energy Supply”*. Artikel yang ditulis pada tahun 2021 ini membahas terkait perbedaan pendekatan yang digunakan oleh presiden Amerika Serikat saat ini yaitu Biden dalam pengelolaan energi dan dampak kenaikan suhu terhadap lingkungan dibandingkan dengan pendahulunya.²¹ Setelah empat tahun pemerintahan Trump menyangkal temuan ilmiah tentang perubahan iklim, Biden

²⁰ Ihsan, R. 2022.

²¹ Murphy, S. 2021. *What’s next for the United States? Part 2 : Climate Change and Energy Supply*. Konrad Adenauer Stiftung:country report. USA, Washington, D.C.

telah berjanji untuk mengikuti ilmu pengetahuan dan melibatkan seluruh pemerintah federal dalam memerangi perubahan iklim. Murphy menyampaikan dalam artikel ini, Biden membentuk kelompok kerja antar-lembaga dan gugus tugas iklim nasional, dikarenakan Biden ingin memastikan bahwa kebijakannya untuk produksi energi bersih dan pengurangan emisi gas rumah kaca, tidak terbatas pada satu lembaga saja, tetapi akan diimplementasikan.

Pada bagian kedua artikel ini memaparkan bahwa Biden terlihat berupaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan. Dia juga melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca, akses terhadap udara dan air bersih, dan peningkatan kesehatan masyarakat yang dikukuhkan sebagai kebijakan serta retorasi dan perluasan monumen nasional. Lebih lanjut, Biden juga menyertakan kebijakan penting untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kulit berwarna, yang secara historis terdampak secara tidak proporsional oleh paparan bahan kimia dan pestisida, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pencemar. Untuk mencapai kebijakannya, Biden menjanjikan penciptaan lapangan kerja serikat pekerja yang bergaji tinggi dan keadilan lingkungan.

Murphy juga mengemukakan, Biden ingin mencapai penghapusan emisi bahan bakar fosil dari sektor listrik selambat-lambatnya pada tahun 2035, dengan menggunakan daya beli federal. Dia memerintahkan penyelarasan pengelolaan lahan, perairan, real estat, dan program keuangan federal dengan mendukung aksi iklim. Untuk mengurangi polusi karbon, semua armada pemerintah federal, negara bagian, dan lokal akan beralih ke kendaraan tanpa emisi. Produksi energi terbarukan di lahan dan air publik akan meningkat. Tiga

puluh persen dari tanah dan air federal akan dicadangkan untuk konservasi. Presiden memerintahkan penghentian sementara sewa minyak dan gas baru di lahan dan perairan publik.²²

Literatur kelima adalah artikel yang ditulis oleh Mark Elder yang berjudul “*Optimistic Prospect for US Climate Policy in the Biden Administration*”. Artikel yang ditulis pada tahun 2021 ini membahas terkait bagaimana Amerika Serikat dalam menempatkan krisis iklim sebagai pusat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat.²³ Amerika Serikat setuju bertekad akan menjalankan kepemimpinannya untuk mendorong peningkatan yang signifikan dalam ambisi iklim global untuk menghadapi tantangan iklim. Mark dalam artikel ini juga memaparkan bahwa dampak dari perubahan iklim ini akan mempengaruhi keamanan nasional Amerika Serikat. Maka dari itu Biden membentuk sebuah Satuan Tugas Iklim Nasional yang beranggotakan pejabat tinggi pertahanan, dan kebijakan luar negeri, sekretaris negara, pertahanan dan keamanan dalam negeri, penasihat keamanan nasional, dan penasihat dalam negeri dan terorisme. Hal ini membuat kebijakan perubahan iklim di Amerika Serikat merupakan kebijakan yang sangat serius. Negara ini juga memiliki anggaran penelitian yang besar yang dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi ramah iklim.

Pada bagian ketiga artikel ini Mark menjelaskan bahwa *The US Department of Defense (DOD)*, mulai fokus pada isu-isu iklim pada masa pemerintahan Obama, ketika mereka mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa

²² Murphy, S. 2021.

²³ Elder, M. 2021. *Optimistic Prospect for US Climate Policy in the Biden Administration*. Institute for Global Environmental Strategies. Japan.

perubahan iklim merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional, dan mereka mulai mempertimbangkan isu-isu iklim dalam pengembangan strateginya.²⁴ DOD mengeluarkan laporan lain mengenai ancaman iklim terhadap keamanan nasional, peringatan akan risiko banjir dan kebakaran besar terkait iklim terhadap instalasi militer Amerika Serikat pada masa pemerintahan Trump. Di bawah kepemimpinan Biden, militer Amerika Serikat akan dapat memperkuat upaya terkait perubahan iklim. Artikel ini menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan tidak bisa hanya disetujui oleh presiden namun membutuhkan persetujuan dari beberapa pihak politik lainnya.

Kebijakan pemerintahan Trump disebut dapat menghalangi kerja sama mengenai isu-isu iklim di semua forum internasional dan bahkan menghindari menyebutkan kata “iklim” dalam dokumen hasil pertemuan. Namun situasi ini berubah total pada saat pemerintahan Biden. Biden menyetujui Amerika Serikat kembali ke kebijakan perubahan iklim (*Paris Agreement*), bahkan memutuskan untuk merombak kembali seluruh kebijakan Trump yang tidak ramah lingkungan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam seluruh proses perubahan iklim internasional ini akan meningkatkan kemajuannya secara signifikan. Presiden Biden bahkan menjadi tuan rumah saat KTT tentang perubahan iklim pada hari bumi, 22 April 2021 dan Amerika Serikat mengumumkan kontribusi nasionalnya (NDC) pada saat itu. Amerika Serikat juga akan mengembangkan strategi untuk mempromosikan program pembiayaan, paket stimulus ekonomi, dan inisiatif keringanan hutang yang selaras dengan mendukung tujuan dari Perjanjian Paris

²⁴ Elder, M. 2021.

di lembaga-lembaga keuangan internasional, termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Strategi lain yang harus dikembangkan termasuk melindungi hutan hujan Amazon dan ekosistem penting lainnya yang berfungsi sebagai penyerap karbon global, lalu kemudian mengakhiri pembiayaan internasional untuk energi berbasis bahan bakar fosil yang intensif karbon sekaligus memajukan pembangunan berkelanjutan dan pemulihan ramah lingkungan serta inovasi dan penerapan energi bersih.²⁵ Secara keseluruhan pada artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan iklim Biden tampak lebih ambisius dibandingkan dengan kebijakan energi. Strategi Biden untuk mendapatkan dukungan politik terhadap kebijakan iklimnya adalah mengemasnya sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja. Namun meskipun rencana Biden dapat dilaksanakan, masih belum jelas apakah rencana tersebut dapat mencapai tujuan dari Paris Agreement yaitu nol emisi karbon (*net zero emission*).

Literatur keenam adalah artikel yang ditulis oleh Ejitu N. Ota dan Chinyere S. Ecoma yang berjudul "*Power and National Interest in International Relations*". Artikel yang ditulis pada tahun 2022 ini membahas adanya persepsi bahwa dunia ini anarkis dan bahwa setiap negara dalam sistem global memiliki nilai-nilai dan cita-cita yang sangat dihargai sehingga lebih memilih untuk berperang daripada berkompromi.²⁶ Menurut Ejitu dan Chinyere para ahli yang menuliskan terkait arti dari *power* yaitu sebagai persyaratan dasar yang harus dimiliki, dipertahankan, dan diperluas oleh setiap negara jika ingin

²⁵ Elder, M. 2021.

²⁶ Ecoma, C. Ota, E. 2022. *Power and National Interest in International Relations*. Department of History and International Relations, Abia State University, Uturu, Nigeria.

mempertahankan kedaulatannya, mencapai kepentingan nasionalnya, dan oleh karena itu, tetap relevan dalam pergaulan antarbangsa. Namun, penting untuk mengakui bahwa meskipun kekuasaan merupakan konsep penting dalam analisis Hubungan Internasional, penekanan pada perannya dalam hubungan antar negara telah menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Sebagai contoh, jika kekuasaan adalah penentu utama dari hubungan antar negara.

Pada bagian ketiga artikel ini menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai sebuah konsep juga dapat ditelaah dari dua dimensi lain. Di satu sisi, analisis konsep ini dapat dengan mudah menyatakan bahwa hubungan kekuasaan merupakan ciri-ciri hubungan antar negara, di antara sejumlah ciri lainnya. Di sisi lain, seorang analis mungkin berpendapat bahwa kekuasaan membedakan Hubungan Internasional dari bentuk-bentuk aktivitas manusia lainnya dalam sistem internasional. Para pendukung pandangan kedua menghubungkan kekuasaan dengan politik nasional dibandingkan dengan aktivitas manusia lainnya. Sebagai contoh, Lasswell dan Kaplan, percaya bahwa sebagai sebuah disiplin empiris, ilmu politik adalah studi tentang bagaimana kekuasaan dapat secara relatif terkonsentrasi atau tersebar, dan bagian yang dipegang oleh individu, strata, kelas, kelompok etnis yang berbeda, dan sebagainya, dapat secara relatif besar atau kecil.

Lebih lanjut, artikel ini kemudian membahas terkait kepentingan nasional suatu negara. Menurut penulis artikel ini kepentingan nasional mengacu pada nilai-nilai atau cita-cita yang sangat dihargai oleh suatu negara sehingga lebih memilih untuk berperang daripada berkompromi. Sebuah nilai adalah sebuah cita-cita yang diterima oleh beberapa individu atau sekelompok individu sebagai

sesuatu yang positif dan diinginkan. Oleh karena itu, nilai-nilai atau cita-cita tersebut haruslah nilai-nilai yang dapat diidentifikasi oleh warga negara yang bersangkutan, di mana pun mereka berada. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai politik, normatif, dan material.²⁷

Nilai-nilai politik berkaitan dengan budaya politik, sementara nilai-nilai normatif berkaitan dengan apa yang secara moral benar atau salah seperti yang dipersepsikan oleh negara, dan nilai-nilai material berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara dan negara. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri negaranya, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan apa yang paling dihargai oleh warga negaranya.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Konstruktivisme

Dalam hubungan internasional, setiap negara pasti memiliki kepentingan nasionalnya untuk menjaga eksistensinya. Kepentingan nasional merupakan tujuan maupun ambisi baik dalam bidang ekonomi, militer maupun budaya suatu negara.²⁸ Kepentingan nasional juga merupakan landasan dasar suatu negara dalam interaksi suatu negara dengan aktor lain, sehingga, kebijakan luar negeri suatu negara harus berpusat pada kepentingan nasionalnya. Berdasarkan hal ini, dalam merumuskan kebijakan luar negeri bahkan politik luar negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh kepentingan nasional. Oleh sebab itu, pada penelitian

²⁷ Ecoma, C. Ota, E. 2022.

²⁸ Budi, R, Bainus, A. 2018. Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional,” *Intermestic: Journal of International Studies* 2 no. 2.

mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam bergabung kembali ke Perjanjian Paris Tahun 2021 ini menggunakan teori konstruktivisme oleh Sarina Theys.

Menurut Jack. C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi umum, tapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.²⁹ Unsur yang dimaksud meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Morgenthau melihat kepentingan nasional sebagai bentuk upaya negara dalam mengejar kekuasaan untuk mempertahankan pengendalian atas negara lain.³⁰ Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, negara menjalankan berbagai strategi, salah satunya dapat dilihat melalui kerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sarina Theys menyatakan, bahwa konstruktivisme melihat dunia dan apa yang dapat kita ketahui tentang dunia, sebagai sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Identitas dan kepentingan merupakan isu sentral dalam konstruktivisme. Para konstruktivis berpendapat bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dibangun secara sosial melalui interaksi dengan aktor-aktor lain.³¹ Identitas adalah representasi dari pemahaman aktor tentang siapa mereka, yang pada gilirannya menandakan kepentingan mereka. Hal ini penting bagi para konstruktivis karena mereka berpendapat bahwa identitas merupakan

²⁹ Jack C. Plano and Roy Otton, *The International Dictionary*, edisi ketiga, (England: Clio Press Ltd, 1982): 7.

³⁰ Hans J. Morgenthau, "Another Great Debate: The National Interest of the United States," *The American Political Science Review*, (Washington, 1952): 973.

³¹ Theys, S. 2018. *Introducing Constructivism in International Relations Theory*.

kepentingan dari tindakan. Sebagai contoh, identitas sebuah negara kecil menyiratkan seperangkat kepentingan yang berbeda dengan negara besar. Negara kecil bisa dibidang lebih fokus pada kelangsungan hidupnya, sedangkan negara besar lebih mementingkan untuk mendominasi urusan politik, ekonomi, dan militer global. Namun, perlu dicatat bahwa tindakan suatu negara harus selaras dengan identitasnya. Oleh karena itu, sebuah negara tidak boleh bertindak bertentangan dengan identitasnya karena hal ini akan mempertanyakan keabsahan identitas tersebut, termasuk preferensinya.

Konstruktivis mengakui eksistensi dan peran konstitutif agen dan struktur baik material maupun ideasional. Elemen-elemen ini membentuk dan menghidupkan struktur internasional. Gagasan khas konstruktivis berporos pada konsep “praktek (*practice*)/interaksi”. Struktur sosial/internasional tidak lain adalah proses sekaligus hasil praktek sosial yang di dalamnya tidak hanya mempertemukan fisik antaragen, tetapi juga mempertemukan, mempertukarkan, mempersamakan dan mendifusikan subjektivitas-subjektivitasnya (*intersubjective processes/discursive practices*).³² Posisi praktek sangat sentral di sini. Hanya dengan praktek struktur dapat terbentuk. Sekumpulan orang atau negara saja tanpa adanya interaksi tidak akan membentuk apa-apa kecuali sekumpulan manusia saja. Tetapi ketika komunikasi interaktif terjadi barulah terbentuk pola atau struktur hubungan sosial. Di sinilah terlihat bahwa konstruktivisme mengangkat derajat subjek dari hegemoni struktur. Tanpa

³² Bilad, C. Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. Diakses pada 1 Agustus 2024 melalui [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/131993-ID-konstruktivisme-hubungan-internasional-m.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/131993-ID-konstruktivisme-hubungan-internasional-m.pdf)

subjek-subjek yang berinteraksi struktur tidak akan pernah ada. Maka sejatinya subjeklah yang berkuasa atas struktur, bukan sebaliknya. Subjeklah yang menentukan bagaimana bentuk, warna dan nuansa struktur tersebut. Subjek juga memiliki kemampuan mentransformasikan struktur yang telah terbentuk ke dalam bentuk, warna atau nuansa lain yang lebih menguntungkan bagi subjek melalui proses intersubjektif.³³

Namun kemudian, setelah tercipta struktur berbalik mempengaruhi subjek-subjek penciptanya. Struktur menjelma menjadi semacam aturan main (*norms*) bagi subjek-subjek itu dalam melangsungkan interaksinya. Proses interaksi menanamkan pengetahuan atau kesadaran dalam benak masing-masing subjek tentang diri sendiri, orang lain, kebutuhan, kepentingan, identitas dan posisi sosialnya. Pengakuan konstruktivis akan signifikansi sumber-sumber material seperti kepentingan nasional dalam menentukan momentumnya.

Norma-norma sosial juga merupakan inti dari konstruktivisme. Norma-norma ini secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas tertentu. Negara yang sesuai dengan identitas tertentu diharapkan untuk mematuhi norma-norma yang terkait dengan identitas tersebut. Gagasan ini muncul dengan ekspektasi bahwa beberapa jenis perilaku dan tindakan lebih dapat diterima daripada yang lain. Proses ini juga dikenal sebagai logika kepantasan, di mana para aktor berperilaku dengan cara-cara tertentu karena mereka percaya bahwa perilaku tersebut adalah pantas. Menurut pendapat Finnemore dan Sikkink terdapat tiga jenis norma, yaitu: norma

³³ Theys, S. 2018. *Introducing Constructivism in International Relations Theory*.

regulatif, norma konstitutif dan norma preskriptif. Norma regulatif mengatur dan membatasi perilaku, norma konstitutif menciptakan aktor, kepentingan atau kategori tindakan baru dan norma preskriptif menetapkan norma-norma tertentu, yang berarti tidak ada norma yang buruk dari sudut pandang mereka yang mempromosikannya.

Sebuah norma pastinya akan melalui siklus hidup norma sebelum dapat diterima. Suatu norma hanya menjadi perilaku yang diharapkan ketika sejumlah besar aktor negara yang relevan mengadopsinya dan menginternalisasikannya dalam praktik-praktik mereka. Sebagai contoh, para konstruktivis berpendapat bahwa sebagian besar negara telah bersatu untuk mengembangkan kebijakan mitigasi perubahan iklim karena ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini, selama beberapa dekade diplomasi dan advokasi, telah menjadi perilaku yang tepat yang diharapkan oleh sebagian besar warga negara untuk dipatuhi oleh para pemimpin mereka.³⁴

Dengan adanya identitas, ide dan norma-norma yang dimiliki Amerika Serikat setelah adanya konstruksi sosial ini akan membawa negara Amerika Serikat untuk menentukan perilakunya. Perilaku ini dapat berupa sebuah kebijakan yang digunakan untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat tersebut. Hal ini terjadi karena kepentingan nasional ini bisa terbentuk dari ide-ide yang dikonstruksikan dalam sosial. Dengan demikian, konsep konstruktivisme memberikan sumbangsih penting bahwa dengan identitas dan norma-norma yang ada dapat menentukan kepentingan dari Amerika Serikat

³⁴ Theys, S. 2018. *Introducing Constructivism in International Relations Theory*.

melalui kebijakan luar negerinya yaitu, bergabung kembali ke Perjanjian Paris pada tahun 2021.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penulisan deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif sendiri didasari oleh gagasan bahwa metode ini memunculkan lebih banyak detail dan nuansa yang lebih variatif dari sebuah fenomena, daripada yang dapat ditemukan melalui reduksi penulisan kuantitatif.³⁵ Adapun pertimbangan lain dalam memilih jenis penulisan kualitatif adalah karena objek kajian yang merupakan sebuah negara. Menurut Thuan Nguyen, penulisan yang dirancang untuk mengetahui bagaimana perilaku dan pikiran seseorang terhadap suatu hal merupakan penulisan kualitatif.³⁶ Dengan memperoleh hasil yang matang, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam proses penulisan ini. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mendeskripsikan berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah penulisan ini, yang kemudian dianalisis secara seksama, sehingga penulis menguraikan kepentingan nasional dari Amerika Serikat dalam bergabung kembali ke Perjanjian Paris tahun 2021.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada uraian mengenai kepentingan Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang memutuskan kembali bergabung ke Perjanjian Paris

³⁵ Samuel Barkin, “‘Qualitative’ Methods?,” in *Qualitative Methods in International Relations*, ed. Audie Klotz and Deepa Prakash (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 211–220.

³⁶ Thuan Nguyen, *Research Methodology: An Introduction*.

pada masa pemerintahan Joe Biden. Dalam peristiwa ini, terdapat beberapa faktor-faktor yang bisa membantu penulis memecahkan keganjilan dalam penulisan ini. Namun, guna menciptakan penulisan yang faktual, struktural, dan tidak mengambang, penulis menetapkan batasan penulisan ini pada rentang tahun 2016 hingga 2024. Alasan ditetapkannya 2016 sebagai titik awal penulisan ini karena Amerika Serikat pertama kali meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun tersebut. Kemudian, memilih keluar dan bergabung kembali pada tahun 2021 dan berlanjut hingga sekarang, tahun 2024.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Serkan Dolma, unit analisis adalah entitas yang dianalisis dalam sebuah penulisan ilmiah. Unit analisis mengacu pada bagian penulisan yang akan menjadi dasar atas hasil dan jawaban penulisan.³⁷ Jika disederhanakan, unit analisis adalah elemen yang hendak diuraikan secara mendalam pada sebuah penulisan. Untuk penulisan ini, penulis menetapkan unit analisisnya yaitu negara Amerika Serikat, dengan variabel dependennya yaitu kepentingan nasional Amerika Serikat karena hal yang akan diteliti yaitu mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan iklim tahun 2021. Tingkat analisis merupakan posisi dan level unit yang akan diteliti, dalam hal ini maka tingkat analisisnya berada pada level negara karena kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap Perjanjian Paris yang akan dianalisis.

Unit eksplanasi merupakan elemen dalam penulisan yang pengaruhnya akan diteliti terhadap unit analisis. Hal ini menjadikan unit eksplanasi sebagai

³⁷ Serkan Dolma, "The Central Role of the Unit of Analysis Concept in Research Design," *Istanbul University Journal of the School of Business Administration* 39, no. 1 (2010): 169–174.

variabel independen, karena kehadirannya memengaruhi variabel dependen.³⁸

Mengacu pada penulisan ini, unit eksplanasi yang penulis tetapkan adalah kebijakan Amerika Serikat bergabung kembali ke Perjanjian Paris tahun 2021.

Dengan demikian, penulisan ini akan mencoba menguraikan kepentingan Amerika Serikat bergabung kembali ke dalam Perjanjian Paris tahun 2021.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan untuk menunjang penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan jenis pengumpulan data melalui bahan bacaan seperti buku, dokumen jurnal, arsip dan kajian literatur yang berhubungan dan tersedia di perpustakaan. Adapun untuk pengumpulan data akan dihimpun dari situs resmi pemerintah Amerika Serikat seperti USA.gov, whitehouse.gov dan untuk situs resmi *United Nations Framework Convention on Climate Change* yaitu unfccc.int sebagai badan yang menaungi Perjanjian Paris. Adapun sumber bacaan utama yang menjadi rujukan data penulis dalam melihat isu lingkungan dan perubahan iklim negara Amerika Serikat yaitu buku *Climate Change and American Foreign Policy* dan *Climate Change in The American Mind (Beliefs & Attitude)*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Pada bagian awal penulis akan melakukan reduksi data yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan isu perubahan iklim, reduksi data sendiri merupakan tahap memisahkan data yang dirasa memiliki korelasi dengan penelitian penulis, selanjutnya data-data tersebut akan dikelompokkan dan

³⁸ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi (Jakarta: Lembaga Penulisan, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990).

disajikan dalam bentuk tabel, bagan, dan narasi. Setelah semua data disajikan, data-data tersebut kemudian akan dideskripsikan dengan interpretasi penulis menggunakan konsep yang penulis pakai yaitu konstruktivisme.

Interpretasi data adalah suatu teknik analisis data dengan menafsirkan makna dan anti substantif dari data dengan tujuan mengungkapkan sejumlah faktor yang saling berhubungan dan membentuk suatu kejadian peristiwa. Setelah data-data dijelaskan menggunakan konsep yang penulis pakai, tahap terakhir yaitu pengambilan kesimpulan, merupakan proses mengambil inti pokok sari dari data-data yang sebelumnya telah diolah oleh penulis. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dalam bergabung kembali ke Perjanjian Paris menggunakan kerangka konseptual konstruktivisme oleh Sarina Theys dimana kepentingan terbentuk dari adanya ide dan norma-norma sosial yang terkonstruksi, baik dari dalam negara tersebut maupun dari sistem internasional. Dengan menjelaskan ide dari negara Amerika Serikat dan pengaruh dari norma-norma sosial yang terkonstruksi dapat menentukan kepentingan nasional yang akan dicapai oleh Amerika Serikat melalui kebijakan luar negerinya yaitu bergabung kembali ke Perjanjian Paris pada tahun 2021. Setelah data-data dijelaskan menggunakan konsep yang penulis pakai, tahap terakhir yaitu pengambilan kesimpulan, merupakan proses mengambil inti pokok sari dari data-data yang sebelumnya telah diolah oleh penulis.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II : Isu Perubahan Iklim di Amerika Serikat

Pada bab ini akan dijelaskan keadaan iklim serta membahas terkait sejarah agenda perubahan iklim di Amerika Serikat. Selanjutnya bab ini akan membahas tentang dua kebijakan luar negeri terkait krisis iklim, yaitu Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris.

BAB III : Kebijakan Iklim (Perjanjian Paris) di Amerika Serikat

Pada bagian awal bab ini membahas terkait dinamika perubahan kebijakan iklim Amerika Serikat pasca Perjanjian Paris (2015-2023). Bab ini membahas terjadinya perubahan kebijakan Amerika Serikat yang awalnya meratifikasi Perjanjian Paris kemudian memutuskan untuk keluar, lalu bergabung kembali disaat pertukaran Presiden yang saat ini yaitu Joe Biden. Selanjutnya pada bab ini menjelaskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Joe Biden setelah bergabung kembali serta dampak yang diberikan oleh kebijakan-kebijakan tersebut.

BAB IV : Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat Pada Perjanjian Paris Tahun 2021

Pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian dari kepentingan nasional Amerika Serikat dalam kebijakan Perjanjian Paris tahun 2021 menggunakan kerangka konseptual yang telah dipilih sebelumnya, yaitu konstruktivisme.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

